

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara besar yang sangat kaya akan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan NKRI dengan mengelola sumberdaya yang ada. Pembangunan yang dilakukan mencakup pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan sebagainya.

Setiap aktivitas pembangunan mempunyai tujuan. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berkelanjutan yaitu proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang baik dan ideal diperlukan suatu perencanaan dan pengelolaan yang baik serta kerjasama dari setiap pihak.

Isu pemeliharaan kelestarian lingkungan merupakan salah satu isu nasional dan juga isu internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu tujuan MDGs (Millenium Development Goals) adalah memastikan kelestarian lingkungan.

MDGs mengadvokasikan pembangunan kawasan ramah lingkungan, dan menggalakkan program cinta lingkungan agar tidak menimbulkan dampak yang parah bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara yang berada di dunia harus melaksanakan pembangunan yang pro terhadap lingkungan.

Pembangunan yang dilaksanakan harus menempatkan aspek-aspek sosial dan lingkungan bukan hanya sebagai kerangka dasar. Oleh karena itu tercetus sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang dimana tujuan pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan sekarang namun juga berorientasi dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan mengelola lingkungan menjadi lebih baik. Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup juga dapat dicegah dengan adanya manajemen lingkungan yang baik. Manajemen lingkungan merupakan sekumpulan aktifitas merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai kualitas lingkungan yang baik. Penciptaan RTH yang ideal merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam manajemen lingkungan. Agar dapat dilaksanakan secara efektif manajemen lingkungan harus mencakup beberapa unsur utama yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Manajemen lingkungan yang efektif diharap tidak hanya fokus terhadap permasalahan RTH yang belum ideal, namun juga diharap fokus terhadap penyebab RTH yang belum ideal.

Surya T. Djajadiningrat mengatakan agar proses pembangunan dapat berkelanjutan harus bertumpu pada beberapa faktor kondisi sumber daya alam,

kualitas lingkungan, dan kependudukan (<http://indrasfc.blogspot.co.id>). Namun kependudukan merupakan unsur dapat menjadi beban sekaligus dapat menjadi unsur yang menimbulkan dinamika proses pembangunan. Karena itu kependudukan perlu dirubah menjadi faktor yang dapat menjadi modal pembangunan. Di Indonesia kependudukan menjadi salah satu masalah yang serius seiring dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk. Pertambahan jumlah penduduk kota berarti juga peningkatan kebutuhan ruang. Karena ruang tidak dapat bertambah, maka yang terjadi adalah perubahan penggunaan lahan yang cenderung menurunkan proporsi lahan – lahan yang sebelumnya merupakan ruang terbuka. RTH (Ruang Terbuka Hijau) merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka yang berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dan daerah terbuka atau area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/ RDTR Kota/ RTR Kawasan Strategis Kota/ RTR Kawasan Perkotaan, dimaksud untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi : kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis, kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi, area pengembangan keanekaragaman hayati, tempat rekreasi dan olahraga masyarakat, tempat pemakaman umum, pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis, penyediaan RTH yang bersifat privat melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya dan area mitigasi/ evakuasi bencana. Ruang Terbuka Hijau memiliki berbagai peran diantaranya: pencipta lingkungan udara sehat, sehingga

dari segi kualitas udara menjadikan masyarakat lebih sehat dan terhindar dari penyakit, penyedia ruang untuk kenyamanan hidup seperti tempat untuk rileks, serta pendukung estetika lingkungan yang berhubungan dengan penataan kota.

Kenyataannya sampai saat ini, beberapa wilayah perkotaan di Indonesia belum melaksanakan penataan ruang secara optimal, khususnya dalam penataan Ruang Terbuka Hijau. Berkurangnya RTH dan bertambahnya dominasi lahan bangunan kota, berdampak pada keseimbangan ekosistem kota dengan indikasi penurunan kualitas lingkungan perkotaan : banjir pada musim hujan, fenomena pulau panas kota (*urban heat island*) pada musim kemarau, dan meningkatnya pencemaran udara kota, kemudian akibat lainnya misalnya saja pada bulan Januari-Februari, memasuki puncak musim hujan, kota (pesisir) seperti Semarang dikepung banjir dan genangan air pasang (rob) yang tak kunjung surut. Akibat dari semua itu adalah rumah-rumah yang terendam, harta yang ikut hanyut, bahkan korban jiwa pun melayang.

Beberapa kota besar di Indonesia seperti Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau yang mengacu pada Undang-Undang No 26 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008. Pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010, ditetapkan Luas RTH sebesar $\pm 17.763,343$ (ha) (47,533%) dari luas wilayah daerah. Selain itu juga, sama halnya seperti Undang-Undang tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan umum tentang Pedoman Penataan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau pun membagi adanya RTH Publik dan RTH

Privat. Luas yang ditetapkan adalah untuk RTH Publik sebesar $\pm 15.395,746$ (ha) (34,204%) dari luas wilayah daerah dan Luas RTH Privat sebesar $\pm 2.367,597$ (ha) (13,329%) dari luas wilayah daerah.

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang dikategorikan sebagai kota metropolitan berpenduduk sekitar 1.691.534 jiwa dengan luas wilayah 37.370,390 hektar (373,7 km²) diharapkan mampu mempertahankan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai upaya menciptakan pengembangan mutu kesehatan lingkungan bagi masyarakat kota Semarang, kelestarian lingkungan, paru-paru kota dan menjamin keseimbangan ekosistem kota maupun untuk ruang publik. Diharapkan, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 Tahun 2010 tersebut, warga Kota Semarang bisa lebih menyadari akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau di kawasan Kota Semarang. Pembangunan gedung-gedung maupun bangunan lainnya diharapkan bisa memperhatikan penataan ruangnya tanpa mengambil bagian lahan yang sebenarnya digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik. Kota Semarang mempunyai 16 Kecamatan dengan luasan lahan Ruang Terbuka Hijau masing-masing bisa dilihat pada tabel I.

Tabel I**Luas Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Semarang**

No	Kecamatan	Luas wilayah (Ha)	Luas RTH (Ha)	Persentase RTH (%)
1	Kecamatan Semarang Tengah	604,99	72,01	11,90
2	Kecamatan Semarang Timur	770,25	73,45	9,54
3	Kecamatan Semarang Selatan	848,05	373,66	44,06
4	Kecamatan Gajah Mungkur	764,98	57,24	7,48
5	Kecamatan Candisari	555,51	34,87	6,28
6	Kecamatan Semarang Utara	1.133,28	107,34	9,47
7	Kecamatan Semarang Barat	2.386,71	667,78	27,98
8	Kecamatan Genuk	2.738,44	1.368,36	49,97
9	Kecamatan Gayamsari	546,47	105,58	19,21
10	Kecamatan Pedurungan	2.072,00	501	24,18
11	Kecamatan Tembalang	4.420,00	1.684,6	38,11
12	Kecamatan Banyumanik	2.513,06	2.048,06	81,50
13	Kecamatan Gunung Pati	5.399,09	3.149,22	58,33
14	Kecamatan Mijen	6.215,25	5.045,39	81,18
15	Kecamatan Ngaliyan	3.269,97	2.341,97	71,62
16	Kecamatan Tugu	3.129,34	1.911,25	61,08
Total		37.370,390	19.541,78	52,29

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang 2017

Berdasarkan Tabel I dapat dilihat bahwa 16 Kecamatan di Kota Semarang memiliki luasan wilayah yang cukup luas yang dapat dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang, jika dilihat dari persentase/ ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari 16 kecamatan di atas, sudah memenuhi persentase / ketentuan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Daerah No 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, dimana sebesar minimal 47,533% ($\pm 17.763,343$ Ha) dari luas wilayah daerah dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan meliputi dua aspek, yaitu : luas RTH Publik seluas 34,204% ($\pm 15.395,746$ Ha) dan luas RTH Privat seluas 13,329% ($\pm 2.367,597$ Ha) dari luas wilayah kota yang dimiliki oleh Kota Semarang seluas 37.370,390 hektar (373,7 km²).

Walaupun secara keseluruhan di Kota Semarang RTH nya sudah memenuhi, jika dilihat dari per kecamatan di Kota Semarang, ternyata masih ada yang belum memenuhi persyaratan RTH minimal yang telah ditentukan. Dimana dari 16 Kecamatan di Kota Semarang ada sekiranya 8 Kecamatan yang belum memenuhi persentase / ketentuan ruang terbuka hijau (RTH), sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Adapun 8 Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kota Semarang yang belum memenuhi persentase / ketentuan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang, ialah: Kecamatan Gajah Mungkur (7,48%), Kecamatan Candisari (6,28%), Kecamatan Pedurungan (24,18%), Kecamatan Gayamsari (19,21%), Kecamatan Semarang Timur (9,54%), Kecamatan Semarang Utara (9,47%), Kecamatan Semarang Tengah (11,90%), Kecamatan Semarang Barat (27,98%).

Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kegagalan demi kegagalan antara lain disebabkan oleh masalah manajemen yang belum efektif. Permasalahan yang terdapat dalam Manajemen Ruang Terbuka Hijau di kota Semarang adalah belum adanya perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan yang baik di bidang SDM. Hal ini dapat dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan yaitu : permasalahan dalam perencanaan adalah kekurangan SDM tenaga pakar lanscape pembangunan taman, permasalahan dalam pengorganisasian adalah penempatan pegawai masih kurang sesuai, permasalahan dalam penggerakan adalah pengembangan potensi bawahan masih kurang optimal. Manajemen Ruang Terbuka Hijau merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas Ruang terbuka Hijau, sebab itu manajemen diupayakan seefektif mungkin mampu meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Manajemen diakui sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Peranan manajemen demikian signifikan dalam meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang, karena meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakakan dan pengawasan.

Berpedoman pada latar belakang, peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti **“MANAJEMEN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG”**. penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan guna meningkatkan kualitas Ruang

Terbuka Hijau di Kota Semarang sesuai dengan amanat Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang perlu adanya pembuatan ruang lingkup permasalahan, maka dirumuskan suatu masalah yaitu :

1. Bagaimana Manajemen Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang?
2. Faktor- faktor apa yang menjadi penghambat dalam Manajemen Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini pada prinsipnya adalah untuk pengetahuan empirisi yang berguna untuk menjawab permasalahan di atas. merupakan aspek penting dalam sebuah penelitian. Dengan demikian berdasarkan penelitian ini dapat diketahui :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang
2. Untuk mengidentifikasi faktor- faktor apa yang menjadi penghambat dalam Manajemen Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan Manajemen Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang. Selain itu, bagi mahasiswa juga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap

kenyataan yang ada mengenai manajemen publik terutama pada instansi pemerintah, sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada nantinya.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Isak Wondiwoi (2011), mahasiswa studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada dengan judul “ Manajemen Pengelolaan Sampah (Studi kasus pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jayapura)”, hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Manajemen Pengelolaan sampah di daerah masih belum efektif dan belum adanya keseriusan pemerintah kota dalam membangun kesadaran warganya untuk mengurangi sampah. Beberapa permasalahan dalam manajemen pengelolaan sampah di Kota Jayapura adalah masih dijumpainya pola pembuangan sampah ke sungai; Terbatasnya SDM, dan sarana prasarana; Sampah yang terangkut ke TPA Nafri masih rendah dibandingkan dengan total produksi sampah; Jangkauan pelayanan pengelolaan sampah masih terbatas; Upah/ gaji buruh tidak sesuai beban kerja; Belum ada perencanaan, koordinasi dan pengawasan yang baik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan fokus penelitian mengenai Manajemen Pengelolaan Sampah (Studi kasus pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jayapura). Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah interview (wawancara), observasi, dokumentasi.

Penelitian selanjutnya tentang manajemen dengan judul “Studi Kualitatif Manajemen Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sekaran Kota Semarang” oleh Oktyan Praditya (2012), mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah di Kelurahan Sekaran masih belum menerapkan manajemen pengelolaan sampah yang meliputi 5 aspek : syarat manajemen pengelolaan sampah di Kelurahan Sekaran belum terpenuhi karena kelima aspek yang digunakan sebagai indikator syarat manajemen tersebut belum memenuhi, peran serta masyarakat selama ini terkait pengelolaan sampah masih sangat rendah, hambatan yang muncul terkait pengelolaan sampah adalah dari aspek operasional sampah yaitu kurang ada hubungan komunikasi antara pengelola sampah KSM dengan pihak Kelurahan Sekaran sehingga operasional pengelolaan sampah belum terlaksana sepenuhnya, penyakit yang selama ini diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang buruk yaitu para pengelola sampah sering terkena iritasi kulit pada saat mengangkut sampah karena tidak pernah memakai APD disertai AKL yang semakin meningkat, selama ini manfaat dari adanya KSM bentukan perseorangan lebih praktis dalam mengelola sampah, dikarenakan belum ada manajemen pengelolaan sampah di Kelurahan Sekaran. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan fokus penelitian mengenai Studi Kualitatif Manajemen Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sekaran Kota Semarang. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah interview (wawancara), observasi, dokumentasi.

Selanjutnya penelitian tentang manajemen dengan judul “ Analisis Manajemen Penanganan Keluhan di Kantor Pertanahan Kota Semarang” oleh Tatang Puji Wibow mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang belum menerapkan manajemen penanganan keluhan secara baik dan benar. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis, Kantor Pertanahan Kota Semarang masih mengabaikan beberapa kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen, yang akhirnya mengakibatkan fungsi perencanaan menjadi kurang matang dan minim langkah antisipasi. Selain itu juga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi pegawai sebagai akibat dari kurang maksimalnya penerapan kegiatan pada fungsi pengorganisasian, serta melemahkan fungsi pengawasan yang mengakibatkan munculnya kondisi lingkungan kerja yang pasif dan rentan memicu terjadinya penyimpangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan analisis data yang berproses secara induktif.

Selanjutnya penelitian oleh Farid Kharisma mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro dengan judul “Manajemen Pengembangan Pariwisata Kabupaten Semarang di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang”. Hasil penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa Manajemen Pengembangan Pariwisata di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang belum sempurna. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan di perencanaan anggaran dan pengorganisasian dimana

kurangnya pegawai berlatar belakang pendidikan pariwisata serta pembagian beban tugas yang diterima para pegawai masih kurang proporsional hal ini disebabkan karena banyaknya beban tugas tetapi tidak ditunjang dengan banyaknya personil. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

Penelitian oleh Ganda Nugraha Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan judul “ Manajemen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Kabupaten Kudus”. Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa Manajemen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Kabupaten Kudus belum efektif. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan di perencanaan SDM dan pengawasan dimana pimpinan kurang terlibat langsung dalam monitoring pelaksanaan program. Manajemen pengelolaan danabagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Kudus menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

1.5.2 Administrasi Publik

Berbicara tentang administrasi, menurut Herbet Simon (Pasolong, 2010:2), mendefenisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Selanjtnya The Liang Gie (Pasolong, 2010:3), mengemukakan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu.

Sutarto dan RP. Soewarno (Damai Damardi, 2009:5) mengemukakan bahwa “administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan”.

Hadari Nawawi (Damai Damardi, 2009:5), berpendapat bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi memiliki pengertian umum yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Kata publik berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang memiliki makna umum, masyarakat atau negara. Publik merupakan umum atau yang berarti untuk kepentingan yang bersifat umum. Publik merupakan masyarakat, yang terdiri dari penduduk dan bukan penduduk. Publik yang merupaka negara adalah suatu kelompok, alat, organisasi kewilayahan atau kedaerahan, kelembagaan rakyat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki daulat, hukum, dan kepemimpinan.

Syafi'ie dkk (Pasolong, 2010:6), mengemukakan bahwa “publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”. Dari pendapat diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa publik ialah umum atau banyak orang.

Administrasi publik menurut Dwight Waldo (Pasolong, 2010:8), adalah “manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan”. Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (Pasolong, 2010:7), mengatakan “administrasi publik adalah kegiatan pemerintahan di dalam melaksanakan politiknya”.

Chandler dan Plano (Pasolong, 2010:7), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Berdasarkan definisi administrasi publik diatas maka disimpulkan bahwa secara sederhana administrasi publik ialah kerjasama sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Barker dalam buku konsep dasar kebijakan publik (Suwitri, 2008 :16) paradigma merupakan seperangkat peraturan dan ketentuan (tertulis maupun tidak) yang melakukan dua hal yang pertama yaitu menciptakan atau menentukan

batas-batas, dan yang kedua adalah menjelaskan kepada kita cara untuk berperilaku didalam batas-batas tersebut agar menjadi orang yang berhasil. Paradigma juga diartikan sebagai sebuah konsensus dari hasil pemikiran yang merupakan bentuk perubahan dari ilmu pengetahuan yang telah ada, dari orang-orang yang mempunyai perhatian yang sama terhadap suatu masalah krisis (Suwitri, 2008:16). Ilmu administrasi negara juga telah melewati beberapa pergantian yang menunjukkan bahwa administrasi negara bukanlah ilmu yang statis tetapi senantiasa berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Prajudi Atmosudirdjo (Pasolong, 2010:28), mengartikan bahwa “paradigma sebagai sudut pandang utama”. Robert T. Golembiewski (Pasolong, 2010:28), mengartikan bahwa “paradigma adalah standar suatu disiplin ilmu dilihat dari fokus dan lokusnya”.

Thomas S. Khun (Pasolong, 2010:27), mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.

Menurut Henry, 2004; 29, Islamy, 1986; 3-7) dalam Suwitri (2008:16) Paradigma Ilmu Administrasi Negara (Publik) sebagai berikut :

Paradigma 1 : Dikotomi Politik - Administrasi (1990-1926)

Paradigma ini me”lokus”kan administrasi negara pada birokrasi pemerintah, sedangkan lembaga legislatif dan yuikatif ber”lokus” di penetapan tujuan dan

keinginan negara (kebijakan negara), sehingga keduanya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari administrasi negara. Kondisi inilah yang disebut dikotomi politik dan administrasi.

Paradigma 2 : Prinsip-prinsip Administrasi (1926-1937)

Pada paradigma ini, administrasi negara mem "fokus" kan diri pada pada pencarian prinsip-prinsip admnisitrasi negara agar pelaksanaan pencapaian tujuan dan keinginan negara dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada paradigma ini ditemukan prinsip-prinsip administrasi negara oleh Luther H. Gulick adn Lyndal Urwick yaitu, POSDCROB, yaitu kependekan dari : *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting.*

Paradigma 3 : Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Simon mempertegas hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik dengan persyaratannya bahwa terdapat hubungan yang sebenarnya sangat kuat dalam proses perumusan kebijakan negara anantara administrasi negara yang bertugas menciptakan struktur kondusif pada masyarakat agar dapat membangkitkan perubahan politik dan sosial yang berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan negara sesuai yang diharapkan.

Paradigma 4 : Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Ilmu administrasi adalah merupakan studi gabungan teori organisasi dan ilmu manajemen. Teori organisasi, menggunakan bantuan dari ilmu jiwa sosial, administrasi niaga, administrasi negara dan sosiologi untuk mempelajari tingkah

laku organisasi, sedangkan ilmu manajemen menggunakan bantuan ilmu statistik, komputer, analisa sistem, ekonomi, dalam mempelajari perilaku organisasi. Prinsip-prinsip ilmu administrasi negarapun tidak dapat melepaskan diri dari bantuan ilmu-ilmu tersebut. Pada tahun 1960-an muncul “pengembangan organisasi” dalam ilmu administrasi, ilmu administrasi negarapun segera mengikutinya.

Paradigma 5 : Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970 sekarang)

Pada paradigma ini ilmu administrasi negara telah menjadi negara dengan ditemukannya lokus pada organisasi publik, yang berbeda tujuannya dengan organisasi bisnis. Fokus administrasi negara dalam bentuk “ilmu administrasi negara yang murni” belum ditemukan, tetapi penggunaan pengembangan teori administrasi, teknik-teknik terapan yang baru pada ilmu manajemen semakin memperkuat perkembangan ilmu administrasi negara. Bahkan keanekaragaman administrasi negara di negara-negara berkembang telah menambahkan spesialisasi baru yaitu “*comparative public administration*”.

Paradigma 6 : Reinventing Government

Pemerintah bergaya „wirausaha“ menjadi cara yang efisien dan efektif untuk menghindari bangkrutnya suatu birokrasi. Pada paradigma ini Administrasi Negara dipaksa untuk melakukan reformasi, sehingga istilah reformasi administrasi, reformasi dan revitalisasi birokrasi serta reorganisasi mengemuka dimana-mana (Caiden, 1982). Paradigma ini bersifat normatif, merubah cara

berfikir tentang peranan administrator publik. Pemerintah (birokrat) tidak lagi dilayani melainkan melayani publik. Pelayanan publik mengedepankan di paradigma ini. Paradigma *Reinventing Government* ini juga dikenal dengan nama *New Public Management* (NPM). NPM membagi konsentrasi Ilmu Administrasi Negara menjadi Ilmu Kebijakan Publik dan Manajemen Publik.

Paradigma 7 : Good Governance

Wirausaha birokrasi (*New Public Management*) harus dijalankan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik. *New Public Management* berjalan seiring dengan *New Public Service*. Kata Pemerintah (*Government*) berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti “mengarahkan”. Tugas pemerintah adalah mengarahkan bukan mengayuh perahu. Tugas *stakeholders* adalah mengayuh perahu dengan pengarahan dari pemerintah (NPM). Stakeholders akan membantu pemerintah dalam tugas melayani sehingga tercapai NPS. Pemerintah akan berjalan dengan baik apabila diikuti pemerintahan yang baik (*good governance*). Denhardt, Denhardt (2003) menyatakan pencapaian *good governance* dalam government merupakan era *New Public Service* (NPS). Prinsip *Good Governance* menurut UNDP (dalam Sedarmayanti, 2003: 7-8) meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*)

Setiap orang atau warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memilikihak suara sama dengan proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka peraturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, di tegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintah yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) dari berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia (*human development*), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

10. Saling Keterbukaan (*Interrelated*)

Keseluruhan ciri *good governance* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (*mutually reinforcing*) dan tidak bisa berdiri sendiri. Paradigma *good governance* beranggapan bahwa sesuatu pemerintahan yang baik adalah yang berorientasi kepada masyarakat dan bukan lagi kepada birokrat. Agar dalam pelaksanaannya terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) harus mendasarkan diri pada prinsip-prinsip *good governance*.

Berdasarkan uraian mengenai paradigma administrasi publik tersebut, maka paradigma yang berkaitan dengan judul yaitu paradigma prinsip-prinsip administrasi, karena prinsip-prinsip administrasi ini berkaitan dengan fungsi manajemen, dimana sama halnya dengan fungsi-fungsi manajemen yang bertujuan agar pelaksanaan pencapaian tujuan dan keinginan negara dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

1.5.4 Manajemen Publik

Secara etimologi, *management* (di Indonesia diterjemahkan sebagai "manajemen") berasal dari kata *manus* (tangan) dan *agere* (melakukan), yang setelah digabung menjadi kata *manage* (bahasa Inggris) berarti mengurus atau *managiere* (Bahasa Latin) yang berarti melatih. Beberapa pendapat para pakar dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Menurut Frederick W. Taylor dalam Tangkilisan (2005 : 252)

The art of management, is defined as knowing exactly what you want to do, and than seeing that they do it in the best and cheapest way.

Maksudnya, ilmu manajemen itu dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya anda kerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah atau tidak.

- b. Menurut George Terry dalam Tangkilisan (2005:252)

Management in distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determined and accomplish stated objectives by the use of human being of other resources.

Maksudnya, manajemen adalah proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan lainnya.

- c. Menurut John D.Millet dalam Tangkilisan (2005:252) *Management is the process directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end.*

Maksudnya, manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang terorganisasi.

- d. Menurut Parjudi dalam Tangkilisan (2005:252), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor dan sumberdaya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.

Untuk membedakan manajemen publik dengan manajemen swasta masih menjadi polemik dalam literatur organisasi dan manajemen. Walaupun manajemen publik mempunyai warna pengabdian masyarakat yang menonjol, namun manajemen juga memiliki warna pelayanan.

Pada dasarnya manajemen publik, yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman dalam Keban (2004:85), mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah "*scientific management*", meskipun sangat dipengaruhi oleh "*scientific management*". Manajemen publik bukanlah "*policy analysis*", bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi

“*rationalinstrumental*” pada suatu pihak, dan orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain.

J. Steve Ott, Albert C. Hyde dan Jay M. Shafritz (Pasolong, 2013: 83) berpendapat bahwa dalam tahun 1990-an, manajemen publik mengalami masa transisi dengan beberapa isu terpenting yang akan sangat menantang, yaitu :

- 1) Privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Rasionalitas dan akuntabilitas.
- 3) Perencanaan dan kontrol
- 4) Keuangan dan penganggaran, dan
- 5) Produktifitas sumber daya manusia

Berdasarkan beberapa definisi manajemen publik di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen publik adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah guna mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan secara baik.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berkaitan dengan manajemen publik, yaitu dalam melaksanakan program pembangunan di bidang lingkungan untuk memberikan pelayanan kepada publik peran manajemen publik juga sangat

menentukan keberhasilan dalam sebuah program pembangunan di bidang lingkungan.

1.5.5 Manajemen

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu: untuk mencapai tujuan, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Ordway Tead (Herlambang, 2013:4), mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses dan perangkat yang mengarahkan dan membimbing kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Di dalam definisi ini menitikberatkan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi.

Stoner (Handoko, 2008:8), mengemukakan bahwa manajemen adalah proses pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa definisi para ahli tersebut, disimpulkan bahwa manajemen adalah proses usaha kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Luther Gulick (Wijayanti, 2008:1) menjelaskan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Di dalam hal

ini manajemen telah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai bidang ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari dalam waktu yang lama dan telah diorganisir menjadi suatu rangkaian teori. Disamping itu Gulick juga beranggapan ada beberapa tahapan-tahapan dalam manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengadaan staf, pengarahan, pengawasan, pembaharuan dan perwakilan.

Menurut George R. Terry dan Leslie W (2013:1) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. George R. Terry merumuskan fungsi-fungsi manajemen sebagai POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). POAC merupakan fungsi manajemen yang bersifat umum dan meliputi keseluruhan proses manajerial. Hakikat dari fungsi manajemen Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi.

Manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari

pengalaman, pengetahuan, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.

Dari beberapa definisi manajemen di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses pengaturan atau ketatalaksanaan untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan orang lain. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber- sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Allison melihat bahwa seorang manajer umum, baik bekerja di swasta maupun pemerintah, paling tidak menjalankan fungsi manajemen sebagai berikut :

1. Menciptakan tujuan dan prioritas
2. Menyusun rencana operasional
3. Melakukan pengorganisasian dan *staffing*
4. Mengarahkan para pegawai dan sistem manajemen kepegawaian
5. Mengendalikan kinerja
6. Berurusan dengan unit-unit luar
7. Berurusan dengan organisasi-organisasi independen
8. Berurusan dengan media massa dan publik

Donovan dan Jackson (Keban, 2008:59) memberikan rincian sub proses atau tugas manajemen yang terdiri atas lima, yaitu :

Pertama, tugas perencanaan yaitu :

- a) Menciptakan kebijakan, tujuan, dan standar
- b) Mengembangkan aturan dan prosedur
- c) Mengembangkan rencana
- d) Melakukan ramalan
- e) Menganalisis lingkungan
- f) Mengevaluasi efektifitas proses perencanaan

Kedua, tugas pengorganisasian yaitu :

- a) Membagi tugas pekerjaan kepada setiap orang
- b) Menciptakan struktur yang sesuai secara fungsional dan sosial
- c) Mendelagasikan otoritas
- d) Menciptakan garis otoritas dan komunikasi
- e) Koordinasi semua pekerjaan bawahan
- f) Mengevaluasi efektifitas proses pengorganisasian

Ketiga, tugas staffing yaitu :

- a) Menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan
- b) Merekrut orang yang berprospek baik
- c) Menyeleksi pegawai/pekerja
- d) Melakukan training dan pengembangan *staff*
- e) Melakukan penilaian kinerja
- f) Melakukan evaluasi terhadap program *staffing*

Keempat, tugas *leading* yaitu :

- a) Mendorong orang untuk melakukan pekerjaannya
- b) Menjaga atau memelihara semangat kerja
- c) Memotivasi para staff
- d) Menciptakan iklim organisasi yang kondusif
- e) Melakukan evaluasi terhadap efektifitas kepemimpinan

Kelima, tugas *controlling* yaitu :

- a) Menetapkan standar
- b) Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan
- c) Mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas
- d) Mengevaluasi kinerja

George R. Terry dan Leslie W dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen menjabarkan fungsi manajemen (2013:9) yang terdiri atas :

a. Perencanaan/ *Planning*

1. “*self audit*” menentukan keadaan sekarang
2. “*survei*” lingkungan
3. Menentukan tujuan “*objectivitas*”
4. “*forecast*” ramalan keadaan-keadaan yang akan datang
5. Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengarahan
6. “*evaluate*” pertimbangan tindakan-tindakan diusulkan
7. Ubah dan sesuaikan “*revisi and adjust*” rencana-rencana sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-keadaan yang berubah-ubah

8. “*communicate*” berhubungan terus selama proses perencanaan

b. Pengorganisasian/ *Organizing*

1. “*identity*” tetapkan dengan teliti dan menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2. “*break your down*” bagi-bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas setiap orang.
3. Tugas-tugas kelompok menjadi posisi.
4. Kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik.
5. Bagi-bagi pekerjaan, pertanggungjawaban dan luas kekuasaan yang akan dilaksanakan.
6. Ubah dan sesuaikan organisasi sesuai dengan hasil-hasil pengawasan dan kondisi-kondisi yang berubah-ubah.
7. Berhubungan selalu selama proses pengorganisasian.

c. Penggerakan/ *Actuating*

1. Berhubungan dengan staf dan jelaskan tujuan-tujuan kepada bawahan.
2. Bagikan ukuran-ukuran pelaksanaan “*performance standarts*”.
3. Latih dan bimbing bawahan untuk memenuhi ukuran-ukuran pelaksanaan itu.
4. Beri bawahan upah berdasarkan pelaksanaan
5. Puji dan tegur dengan jujur
6. Adakan lingkungan yang memberikan dorongan dengan meneruskan keadaan yang berubah-ubah serta tuntutan-tuntutannya.

7. Ubah dan sesuaikan cara-cara memotivasi sehubungan dengan hasil pengawasan dan kondisi yang berubah.
8. Berhubungan selalu selama proses memotivasi.

d. Pengawasan

1. Tetapkan ukuran-ukuran.
2. Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran.
3. Perbaiki penyimpangan-penyimpangan.
4. Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan-perubahan kondisi-kondisi.
5. Berhubungan selalu selama proses pengawasan.

Bentuk manajemen yang baik salah satunya tercapainya efisiensi dan efektivitas dari sebuah kegiatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Menurut **Peter Drucker** (Handoko, 2009:7), efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedang efisiensi adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing things right*), yang paling penting adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan yang benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan, dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut.

Dari berbagai definisi manajemen tersebut, maka manajemen merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Semarang, karena semua organisasi sangat membutuhkan manajemen dan tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan menjadi hal yang

harus diperhatikan secara serius supaya pengelolaan ruang terbuka hijau dapat berjalan dengan optimal dan menciptakan ruang terbuka hijau yang ideal.

1.5.6 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau pada hakikatnya merupakan salah satu unsur ruang kota yang mempunyai peran penting setara dengan unsur-unsur kota yang lain. Berbagai referensi menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau merupakan lahan-lahan alami yang ada di wilayah perkotaan. Bentuk Ruang Terbuka Hijau yang berupa fasilitas umum/ publik, sebagai tempat beraktivitas adalah taman kota, taman pemakaman, lapangan olahraga, hutan kota, dan lain-lain yang memerlukan area lahan/ peruntukan lahan hijau secara definitif.

Ruang Terbuka Hijau yang ditanami tumbuhan jenis produktif, buah dan pangan adalah sawah, pertanian darat, dan pekarangan rumah yang memerlukan area lahan/ peruntukan lahan hijau pertanian secara definitif. Ruang Terbuka Hijau jalur hijau yang bukan untuk ditanami pohon dalam mendukung fungsi pengamanan, peneduh, dan keindahan kota adalah jalur kereta api, tegangan tinggi, sungai/tepi kali, dan pantai (pengaman); jalur pinggir/ median jalan kota dan lingkungan (peneduh); dan jalur jalan, kavling bangunan kantor, industri, perdagangan, dan lain-lain (keindahan kota).

Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu lahan/ kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri Ruang Terbuka Hijau di wilayah

perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya.

Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang terbuka yang diklasifikasikan sebagai ruang atau lahan yang mengandung unsur dan struktur alami. Ruang Terbuka Hijau ini dibedakan dalam dua macam, yaitu : Ruang Terbuka Hijau alami dan Ruang Terbuka Hijau binaan. Ruang Terbuka Hijau alami terdiri atas daerah hijau yang masih alami, daerah hijau yang dilindungi agar tetap dalam kondisi alami dan daerah hijau yang difungsikan sebagai taman publik tetapi tetap dengan mempertahankan karakter alam sebagai basis tamannya. Ruang Terbuka Hijau binaan terdiri atas daerah hijau di perkotaan yang dibangun sebagai taman kota, daerah hijau yang dibangun dengan fungsi rekreasi bagi warga kota, dan daerah hijau antar bangunan maupun halaman-halaman bangunan yang digunakan sebagai area penghijauan. Pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau harus diarahkan sebagai infrastruktur hijau, sebagai penyeimbang ekosistem kota. Ruang Terbuka Hijau dimaknai tidak sekedar peruntukan lahan saja, tetapi merupakan sistem yang mempunyai landasan kuat (Nirwono Joga, 2011: 91-95).

1.5.6.1 Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Fungsi Ruang Terbuka Hijau meliputi fungsi pelayanan fasilitas umum bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan – kegiatan aktif di dalamnya, seperti berinteraksi/ berekreasi, berolahraga, berwisata hutan dan lain-lain; fungsi pengaman, peneduh, dan keindahan kota secara proporsional pada ruang – ruang kota; dan fungsi budidaya pertanian bagi kegiatan pertanian kota.

Ruang Terbuka Hijau sebagai infrastruktur hijau memiliki fungsi beragam (Nirwono Joga, 2011: 98-101), yaitu :

a. Konservasi tanah dan air

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat penting untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah, menyuplai cadangan air tanah, dan mengaktifkan siklus hidrologi.

b. Ameliorasi iklim

Keberadaan tanaman dan unsur air sebagai unsur utama Ruang Terbuka Hijau mampu menciptakan iklim mikro yang lebih baik.

c. Pengendali pencemaran

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau dapat mengendalikan bahan pencemaran (polutan), sehingga tingkat pencemaran dapat ditekan dan konsentrasi karbon dioksida dapat berkurang.

d. Habitat satwa dan konservasi plasma nutfah

Keberadaan satwa liar di wilayah perkotaan memberi warna tersendiri bagi kehidupan warga kota dan menjadi indikator tingkat kesehatan lingkungan kota.

e. Sarana kesehatan dan olahraga

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat berperan untuk meningkatkan kesehatan dan olahraga.

f. Sarana rekreasi dan wisata

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau mendukung kebutuhan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai tempat sarana rekreasi dan interaksi sosial warga.

g. Sarana pendidikan dan penyuluhan

Keberadaan tanaman dan unsur alam lainnya sebagai habitat satwa dan burung secara tidak langsung menjadi sarana pembelajaran bagi warga, terutama anak-anak, selain meningkatkan kualitas lingkungan kota.

h. Area evakuasi bencana

Perlu pengembangan mitigasi bencana dengan menyiapkan area terbuka di kawasan perkotaan yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi. Ruang Terbuka Hijau seperti taman, halaman, lapangan bola dapat digunakan sebagai area evakuasi warga saat terjadi bencana.

i. Pengendali tata ruang kota

Ruang Terbuka Hijau sebagai kawasan preservasi atau konservasi yang berbentuk jalur hijau dapat dijadikan alat pengendali tata ruang kota dengan fungsi sebagai sabuk hijau (*green belt*) atau jalur hijau pembatas kawasan maupun pembatas wilayah kota.

j. Estetika

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau dapat meningkatkan daya tarik dan keindahan suatu kota. Tanaman memiliki bentuk, warna, dan tekstur beraneka ragam sehingga dapat menambah keindahan pemandangan lanskap kota.

1.5.6.2 Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat Ruang Terbuka Hijau berdasarkan fungsinya dibagi atas :

- a. Manfaat langsung, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah).

- b. Manfaat tidak langsung, yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

1.5.6.3 Klasifikasi dan Jenis Ruang Terbuka Hijau

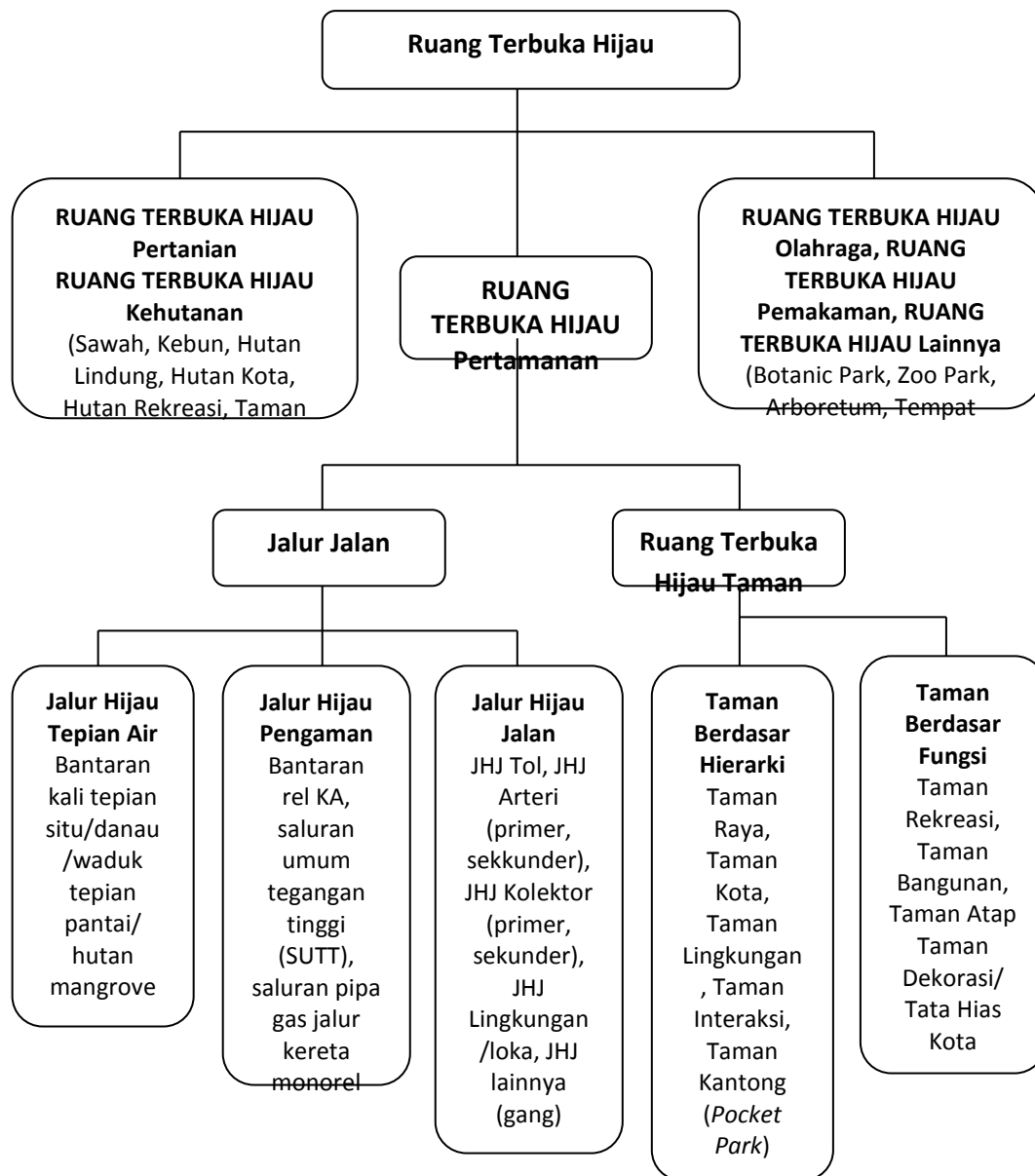
Ruang Terbuka Hijau dapat dibedakan dalam berbagai jenis dan bentuk, seperti : Ruang Terbuka Hijau pekarangan/ halaman, Ruang Terbuka Hijau pertanian, Ruang Terbuka Hijau kehutanan, Ruang Terbuka Hijau pertamanan, Ruang Terbuka Hijau olahraga, Ruang Terbuka Hijau pemakaman dan jenis Ruang Terbuka Hijau lainnya. Bentuk Ruang Terbuka Hijau dibedakan menjadi dua, yaitu : Ruang Terbuka Hijau berbentuk area hijau dan Ruang Terbuka Hijau berbentuk jalur hijau.

Taman kota, taman lingkungan dan taman rekreasi pada umumnya berbentuk area hijau dengan luasan tertentu karena banyak digunakan masyarakat untuk berbagi kegiatan, sedangkan Ruang Terbuka Hijau yang berada di tepi jalan, sempadan sungai dan tepian pantai berbentuk koridor jalur hijau. Berdasarkan kepemilikan, Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah maupun pusat disebut Ruang Terbuka Hijau Publik. Ruang Terbuka Hijau Taman Publik kota, taman lingkungan, taman interaksi dan taman makam dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pemakaman; hutan lindung, hutan kota, taman hutan raya dikelola Dinas Kehutanan; sedangkan jalur hijau di bawah wilayah kelola berbagai instansi terkait seperti jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, jalur hijau pantai dan sebagainya.

Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki masyarakat seperti halaman rumah, pekarangan dan lahan-lahan yang dimiliki swasta disebut Ruang Terbuka Hijau privat. Ruang Terbuka Hijau privat adalah lahan di sekitar bangunan berupa halaman atau pekarangan, baik berupa taman bangunan maupun taman-taman rekreasi, yang dikembangkan pihak swasta. Gambaran klasifikasi dan jenis Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan dapat dilihat pada skema berikut.

Bagan 1.5

Klasifikasi dan Jenis Ruang Terbuka Hijau



Sumber : Nirwono Joga, 2010:104

1.6 Operasionalisasi Konsep

Fenomena-fenomena manajemen yang akan diamati dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. *Planning*/ Perencanaan

Dibawah ini merupakan langkah-langkah dalam proses perencanaan :

1. Menentukan tujuan, sasaran atau visi dan misi diterjemahkan dari fungsi manajemen perencanaan menentukan tujuan “*objectivitas*”.
2. Merumuskan/membuat kebijakan diterjemahkan dari fungsi manajemen perencanaan “*forecast*” ramalan keadaan-keadaan yang akan datang.
3. Menyusun target atau skala prioritas diterjemahkan dari fungsi manajemen perencanaan ubah dan dan sesuaikan “*revisi and adjust*” rencana-rencana sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-keadaan yang berubah-ubah.

b. *Organizing*/ Pengorganisasian

Dibawah ini merupakan kegiatan yang termasuk dalam proses pengorganisasian :

1. Membagi pekerjaan dalam tugas operasional diterjemahkan dari fungsi manajemen pengorganisasian “*break your down*” bagi-bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas setiap orang.
2. Menempatkan orang pada pekerjaan/ posisi yang tepat diterjemahkan dari fungsi manajemen pengorganisasian kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik.
3. Menciptakan struktur yang sesuai secara fungsional dan sosial diterjemahkan dari fungsi manajemen pengorganisasian bagi-bagi pekerjaan, pertanggungjawaban dan luas kekuasaan yang akan dilaksanakan.

4. Koordinasi semua pekerjaan bawahan diterjemahkan dari fungsi manajemen pengorganisasian berhubungan selalu selama proses pengorganisasian.

c. *Actuating/ Penggerakan*

Dibawah ini merupakan kegiatan yang termasuk dalam proses penggerakan :

1. Mengupayakan adanya partisipasi dari semua pihak yang terlibat diterjemahkan dari fungsi manajemen penggerakan berhubungan dengan staf dan jelaskan tujuan-tujuan kepada bawahan.
2. Memberikan motivasi diterjemahkan dari fungsi manajemen penggerakan beri bawahan upah berdasarkan pelaksanaan, puji dan tegur bawahan, ubah dan sesuaikan cara-cara memotivasi sehubungan dengan hasil pengawasan dan kondisi yang berubah, adakan lingkungan yang memberikan dorongan dengan meneruskan keadaan yang berubah-ubah serta tuntutan-tuntutannya.
3. Mengembangkan potensi bawahan secara optimal diterjemahkan dari fungsi manajemen penggerakan latih dan bimbing bawahan untuk memenuhi ukuran-ukuran pelaksanaan itu.

d. *Controlling/ Pengawasan*

Dibawah ini merupakan kegiatan yang termasuk dalam proses pengawasan :

1. Menetapkan standar atau ukuran diterjemahkan dari fungsi manajemen pengawasan tetapkan ukuran-ukuran.
2. Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan diterjemahkan dari fungsi manajemen pengawasan ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan-perubahan kondisi.
3. Proses akuntabilitas diterjemahkan dari fungsi manajemen pengawasan perbaiki penyimpangan-penyimpangan.

4. Mengevaluasi kinerja diterjemahkan dari fungsi manajemen pengawasan monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Denzim dan Lincoln dalam Moleong (2007:5) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Moleong (2007:11) didalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Secara umum penelitian dalam Pasolong (2012:75) dapat digolongkan dalam tiga tipe penelitian, yaitu :

1. Penelitian Eksploratif (Penjajakan), yaitu suatu penelitian yang bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum mempunyai hipotesa, pengetahuan penelitian tentang gejala yang ingin diteliti masih kurang, sehingga penelitian penjajakan sering dilakukan sebagai langkah pertama untuk penelitian penjelasan maupun penelitian deskriptif. Melalui eksploratif tersebut masalah penelitian dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan lebih terinci.
2. Penelitian Explanatory (Penjelasan), yaitu penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan, oleh karena itu dinamakan penelitian pengujian hipotesa yang telah dirumuskan atau *testing research*.

3. Penelitian Deskriptif (Penggambaran), yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara obyektif.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan fakta-fakta dan fenomena-fenomena bentuk, tahapan serta faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen ruang terbuka hijau di kota Semarang.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat / lokasi peneliti melakukan penelitian. Situs penelitian yang dipilih oleh peneliti pada penelitian Manajemen Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

1.7.3 Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian haruslah orang-orang yang benar-benar tahu dan memahami mengenai permasalahan yang ada. Dimana subjek penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi latar penelitian, dengan kata lain subjek penelitian merupakan informan atau orang yang memberikan informasi (Moleong, 2007:168). Didalam menentukan informan teknik yang dipergunakan penulis adalah *purposive sampling*, artinya

pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh *key informan* yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar atau orang-orang yang terpercaya. Alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu, agar langsung bisa memilih informan yang benar-benar tahu dan paham persoalan tersebut. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
2. Kepala Seksi Bagian Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

1.7.4 Jenis Data

Lofland dan Lofland dalam Moleong (2010:157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata- kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Jenis- jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kata- Kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang- orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Di dalam melakukan penelitian ini peneliti harus memperhatikan kondisi persentase ruang terbuka hijau di kota Semarang. Peneliti juga harus mewawancarai orang yang sudah dijadikan informan untuk mendapatkan tersebut. Di dalam melakukan wawancara tersebut tentunya peneliti harus bertanya dan kemudian mendengarkan apa

saja yang dikatakan oleh informan, sehingga dapat dijadikan data untuk penelitian ini.

b. Sumber tertulis

Menurut Moleong (2010:159) menyatakan bahwa dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Didalam penelitian ini penulis menggunakan sumber tertulis yaitu berupa buku, internet dan dokumen resmi. Dokumen resmi didapatkan melalui Bapenda Kota Semarang, Kelurahan Tembalang dan bisa juga dari situs resmi instansi yang terkait.

c. Foto

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi- segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif (Moleong, 2010:160). Foto-foto yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif dapat berupa foto yang dihasilkan oleh orang lain dan yang dihasilkan oleh si peneliti sendiri, selain itu waktu pengambilan foto juga akan mempengaruhi keadaan yang tepat sehingga dapat lebih akurat.

d. Data statistik

Data Statistik Penelitian kualitatif sering menggunakan data statistik yang digunakan untuk sumber data tambahan. Data statistik dapat membantu memberikan gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian (Moleong, 2010:162).

1.7.5 Sumber Data

Menurut Pasolong (2012:70), data penelitian digolongkan menjadi :

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Didalam penelitian ini data primer yang dipergunakan ialah data dan informasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder berupa data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia dari Bapenda Kota Semarang. Macam data sekunder diantaranya :

a. Data sekunder yang pribadi, meliputi :

1. Dokumen-dokumen pribadi
2. Data yang tersimpan di lembaga-lembaga (instansi) pada umumnya berupa fil-file

b. Data sekunder yang bersifat praktek, meliputi :

1. Data arsip
2. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah
3. Data yang dipublikasikan

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu, pihak yang dimaksud ialah pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186). Di dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dimana peneliti dapat lebih bebas melakukan wawancara dan wawancara terstruktur dimana peneliti tetap menggunakan *interview guide* (pedoman wawancara) yang dibuat sebelum peneliti terjun ke lapangan, menyiapkan beberapa pertanyaan dan jawaban. Hal ini untuk mengantisipasi apabila narasumber kurang aktif didalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Di dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Pertamanan dan Pemakaman, Kepala Seksi Bagian Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

2. Dokumentasi

Guba dan Lincoln dalam Moleong (2007:216) mendefinisikan bahwa dokumen ialah setiap bahan tertulis maupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji,

menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis Data menurut Bodgan dalam Sugiyono (2009:244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Ada beberapa model analisis data kualitatif yang bisa dijadikan pilihan dalam melakukan penelitian, salah satunya adalah Model Miles dan Huberman. Menurut Model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246-253) ada beberapa langkah-langkah analisis data, yaitu :

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Nantinya data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data Display

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion Drawing/ Verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang dan setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Berdasarkan seluruh analisis diatas, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi, dan argumentasi mengenai manajemen ruang terbuka hijau kota Semarang.

1.7.8 Kualitas Data

Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kredibilitas dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Banyak ahli yang memaparkan berbagai cara tentang penggunaan teknik triangulasi. Pendapat beberapa ahli tentang teknik triangulasi, dan menyimpulkan penggunaan teknik triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data triangulasi (triangulation)

melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut (Moleong, 2007:330-331) :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah/ tinggi, orang berada, dan pemerintahan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan